BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki tujuan yaitu menciptakan pemerintah daerah yang demokratis, transparan, meningkatkan kapasitas administrasi, dan lebih mandiri serta mampu di dalam pengelolaan fiskal. Pada pelaksanaannya di Indonesia tidak hanya meningkatkan transparansi informasi namun juga telah memunculkan dominasi kontrol elit lokal (Jaya, 2010). Dominasi ini terlihat dari kecenderungan para elit lokal untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan, salah satunya dengan politik dinasti. Politik dinasti diartikan oleh Querrubin (2011) yaitu sejumlah atau sekelompok keluarga yang memonopoli kekuasaan politik.

Politik dinasti mewariskan jabatan maupun memperluas kekuasaan eksekutif kepada keluarga dapat menyebabkan penurunan kinerja dan menghambat pembangunan ekonomi (Asako *et al*., 2012). Selain itu, politik dinasti dapat mencederai proses politik dan berpotensi mengganggu jalannya pengelolaan keuangan yang akuntabel (Adzani & Martani, 2014). Semakin banyaknya politik dinasti di sejumlah daerah hal tersebut juga diwarnai dengan maraknya potensi korupsi yang dilakukan para anggota keluarga dinasti tersebut.

Fenomena politik dinasti merupakan hal yang masih menjadi sorotan, bahkan fenomena ini terjadi di beberapa negara, seperti Filipina, Argentina, Amerika Serikat, dan Jepang (Iqbal, 2015). Di Indonesia, tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat 57 daerah yang melakukan Politik dinasti tersebar di berbagai daerah, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Maluku (Kompas, 2013). Contoh politik dinasti yang sangat menjadi sorotan di Indonesia yaitu di Provinsi Banten, politik dinasti Gubernur Ratu Atut Chosiyah menguasai jabatan kepala daerah di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Adik Ratu Atut menjadi Wakil Bupati Serang, ibu tiri menjadi Wakil Bupati Pandeglang, adik ipar menjadi Wakil Walikota Tangerang Selatan, dan adik tiri menjadi Walikota Serang. Politik dinasti Atut membuat penyelenggaraan pemerintah rawan dengan penyelewengan kekuasaan dan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pemerintah tidak efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Iqbal, 2015).

Kerawanan praktik politik dinasti di Banten terbukti setelah 8 tahun berkuasa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah pada bulan Desember 2013 ditangkap. Ratu Atut menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan suap Pilkada Lebak yang bermula dari tertangkapnya salah satu anggota keluarga Atut yang melakukan proyek koruptif (Kompas, 2013). Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini politik dinasti berpeluang besar menciptakan birokrat yang koruptif (Kompas, 2017).

Politik dinasti menjadi fenomena yang mendapat perhatian serius hingga menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan pada Pasal 7 huruf (r) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang" yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia membatasi praktik Politik dinasti. Pasal 7 huruf r menyatakan bahwa syarat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana". Namun pada 8 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut melalui putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 karena aturan larangan seorang calon kepala daerah yang berkonflik kepentingan dengan petahanan itu bertentangan dengan konstitusi (CNN Indonesia, 2015).

Namun walaupun politik dinasti menjadi fenomena yang menjadi perhatian di Indonesia, menurut Nuritomo & Rossieta (2014) penelitian mengenai politik dinasti yang dikaitkan dengan aspek keuangan masih jarang. Di Indonesia penelitian tentang politik dinasti dari aspek keuangan di mulai oleh Nuritomo & Rossieta (2014). Mereka meneliti pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada daerah dinasti dan nondinasti selama tahun 2011-2012. Pada penelitian tersebut politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pada penelitian Asako *et al*. (2012) menyatakan bahwa politik dinasti menyebabkan kinerja pembangunan lebih rendah dan Adzani & Martani (2014) mengungkapkan bahwa politik dinasti menurunkan tingkat

akuntabilitas sehingga berpengaruh negatif terhadap opini audit yang pada penelitian ini dijadikan ukuran akuntabilitas keuangan. Selain itu, temuan Iqbal (2015) pada penelitiannya tentang "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia", mendapat hasil bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja pelayanan publik, tetapi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, bahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah. Namun ada juga penelitian terdahulu tentang politik dinasti, yang dilakukan oleh Irmawati & Suryo (2016) dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia"**.** Mereka menemukan hasil yang berbeda bahwa politik dinasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, ada yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah, namun ada pula yang berpendapat bahwa politik dinasti tidak berpengaruh . Selain itu terdapat pula fakta yang terjadi yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah di Indonesia dikatakan masih rendah, karena pada tahun 2016 dari 513 pemerintah kabupaten/kota sebesar 425 pemerintah daerah, atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C (Beritagar, 2017). Dari fakta tersebut terlihat penurunan kinerja bukan hanya terjadi pada daerah politik

dinasti saja, tetapi di sebagian besar daerah di Indonesia. Kemudian fakta lain, sebanyak tujuh pemerintah daerah mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha di Hari Otonomi Daerah ke-21 pada 2016 sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik selama tiga tahun berturut-turut sejak 2013-2015. Ketujuh Pemda itu antara lain, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantul, dan dua kota, yakni Surabaya dan Samarinda (Kompas, 2017). Dari ketujuh pemerintah daerah yang mendapat penghargaan tersebut terdapat dua daerah yang merupakan daerah yang terindikasi politik dinasti yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bantul. Walaupun banyak penelitian yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap kinerja dan akuntabilitas, tetapi di dapati daerah yang terindikasi dinasti ada yang memiliki kinerja baik. Bahkan daerah tersebut mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan kinerja terbaik.

Pada beberapa penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh dari politik dinasti, tanpa melihat apakah ada perbedaaan aspek keuangan antara daerah yang terindikasi dan tidak terindikasi politik dinasti. Melihat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kemudian dibandingkan dengan beberapa fakta yang menyatakan bahwa ada beberapa daerah politik dinasti yang mendapat penghargaan terkait kinerjanya, oleh sebab itu pada penelitian ini ingin menguji apakah terdapat perbedaan akuntabilitas keuangan dan kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti. Penelitian ini ditujukan untuk menambah bukti empiris dalam kajian tentang politik dinasti di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Politik dinasti dipandang negatif sebagian besar orang. Bahkan beberapa penelitian menyatakan politik dinasti dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan mengganggu pengelolaan keuangan akuntabel. Namun berdasarkan fakta yang ada penurun kinerja pemerintah daerah di Indonesia terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk daerah non dinasti. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan yang tidak terindikasi politik dinasti?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan yang tidak terindikasi politik dinasti.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1) Pemerintah, dapat mengetahui tentang akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia terkait politik dinasti sehingga bisa menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintah.
2) Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian yang terkait dengan riset ini.
3) Pengembang ilmu pengetahuan, dengan memberikan bukti apakah ada perbedaan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara daerah yang terindikasi politik dinasti dan tidak terindikasi politik dinasti.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab kedua ini berisikan teori-teori yang melandasi penelitian ini dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan mengenai objek penelitian, sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.